SURVEI KESIAPAN PENERAPAN FATWA DSN NO. 96 TRANSAKSI HEDGING/LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR DENGAN ‘*AQD AL-TAHAWWUTH BI AL-SIL’AH*

1. INFORMASI PENELITI

Nama : Yunisa Fitriana

No. HP : 081255568375

Email : [fitrianayunisa@gmail.com](mailto:fitrianayunisa@gmail.com)

NIM : 1506.0014

Program Studi : Islamic Accounting

Instansi : Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia

No. Telepon : (021) 8796 2291-93

No. Fax : (021) 8796 2294

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No 78, Sentul City, Bogor. 16810

Email : [pascatazkia@gmail.com](mailto:pascatazkia@gmail.com)

Website : <http://www.tazkia.ac.id>

1. INFORMASI RESPONDEN

Nama :

Instansi :

Jabatan :

Email :

Nomor Telepon Responden :

1. PETUNJUK PENGISIAN
2. Kuesioner ini berisi 17 (Tujuh Belas) pertanyaan.
3. Untuk pertanyaan berdasarkan ranking, harap urutkan sesuai dengan urutan dari 1 (satu) yang paling tertinggi/prioritas utama dan nomor terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir.
4. Untuk pertanyaan pilihan, harap untuk mencentang (√) pada kolom yang telah disediakan, diperbolehkan mencentang lebih dari satu. Apabila tidak ada jawaban, dimohon untuk mengisi di barisan alasan.
5. Opsi **lainnya** diberikan apabila pengisi kuesioner mempunyai jawaban lain atau komentar tentang pertanyaan serta pilihan jawaban yang tersedia.
6. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan tesis, tanpa ada tujuan/kepentingan lainnya. Semoga kuesioner ini dapat membantu dalam mendapatkan gambaran mengenai Kesiapan Penerapan Fatwa DSN No. 96 Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah.
7. Mohon dikembalikan secepatnya kepada peneliti dengan konfirmasi terlebih dahulu melalui email [fitrianayunisa@gmail.com](mailto:fitrianayunisa@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 02 April 2015, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi *hedging*/lindung nilai syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar. Pertimbangan munculnya fatwa tersebut, yaitu adanya paparan (exposure) risiko dalam mata uang asing, ketentuan dan instrumen *hedging*/lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah belum tersedia, serta transaksi *hedging*/lindung nilai syariah diharapkan dapat mendukung perkembangan industri keuangan syariah.

Fatwa DSN No. 96 ini mengemukakan tiga mekanisme transaksi *hedging*/lindung nilai syariah, yaitu:

1. Mekanisme transaksi *hedging*/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘Aqd al-Tahawwuth al-Basith*, dengan skema sebagai berikut:

Terdapat dua pihak yang melakukan transaksi *hedging*/lindung nilai. Kedua belah pihak 1) saling berjanji (*muwa’adah*) untuk melakukan transaksi dalam bentuk *forward agreement* dengan: a. menetapkan mata uang yang diperjualbelikan; b. jumlah nominal; c. perhitungan nilai tukar; dan d) waktu pelaksanaan. Kemudian, kedua belah pihak melakukan 2) ijab qabul sekaligus transaksi *spot* hingga serah terima mata uang

2) ijab qabul+ spot-serah terima mata uang

Pihak

A

Pihak

B

1. Muwa’adah-*forward agreement*)
2. Mekanisme transaksi *hedging*/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*, dengan skema sebagai berikut:

Terdapat dua pihak yang melakukan transaksi *hedging*/lindung nilai. Kedua belah pihak tersebut 1) melakukan transaksi spot kemudian saling berjanji (*muwa’adah*)/*forward agreement* dengan menetapkan: a. mata uang yang diperjualbelikan; b. jumlah nominal; c. perhitungan nilai tukar; dan d. waktu pelaksanaan. Kemudian, kedua belah pihak tersebut melakukan 2) ijab qabul sekaligus transaksi *spot* hingga serah terima mata uang

1. ijab qabul+ spot-serah terima mata uang

Pihak

B

Pihak

A

1. Transaksi Spot+Muwa’adah/*forward agreement*
2. Mekanisme Transaksi *hedging*/lindung nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah*

Terdapat dua mekanisme dalam melakukan Transaksi H*edging*/Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah,* yaitu sebagai berikut

Transaksi 1

Terdapat dua pihak yang melakukan transaksi *hedging*/lindung nilai. Adanya 1) wa’d (janji) dari pihak konsumen komoditi dalam transaksi yang akan dibayarkan secara tunai, tahap dan tangguh kepada peserta komersial, kemudian peserta komersial membayarkan secara 2) tunai untuk transaksi terhadap pedagang komoditi dengan penyerahan 3) SPAKT oleh pedagang komoditi terhadap peserta komersial. Lalu, konsumen komoditi melakukan 4) transaksi murabahah dengan pembayaran secara tunai, tahap dan tangguh lalu dilanjutkan dengan transaksi antara konsumen komoditi dengan pedagang komoditi melalui 5) jual sil’ah secara tunai.

Peserta Komersial

Konsumen Komoditi

4) Murabahah, tunai-tahap-tangguh

1. Wa’d, tunai-tahap-tangguh

2) Tunai

5) Jual Sil’ah Tunai

Pedagang Komoditi

3) SPAKT

Transaksi 2

Terdapat dua pihak yang melakukan transaksi *hedging*/lindung nilai. Adanya 1) wakalah oleh konsumen komoditi kepada peserta komersial dalam pembelian sil’ah secara tunai, yang diikuti dengan pembelian secara 2) tunai oleh peserta komersial kepada pedagang komoditi, kemudian konsumen komoditi mendapatkan 3) SPAKT yang diserahkan oleh pedagang komoditi. Konsumen komoditi kemudian melakukan pembiayaan 4) murabahah kepada peserta komersial yang pembayarannya dilakukan secara tunai, tahap dan tangguh beserta penyerahan SPAKT, sehingga pedagang komoditi membeli secara 5) tunai sil’ah dari peserta komersial dan berakhir terhadap penyerahan 6) mata uang oleh konsumen komoditi terhadap peserta komersial.

6) Mata uang diserahkan

Peserta Komersial

Konsumen Komoditi

4)Murabahah, tunai-tahap-tangguh+ SPAKT)

1) Wakalah, sil’ah tunai

2) Tunai

3) SPAKT

Pedagang Komoditi

5) Tunai

5 (Tunai)

Informasi tambahan:

1. Konsumen komoditi adalah nasabah.
2. Peserta komersial adalah Bank
3. Pedagang komoditi adalah produsen komoditi.
4. Semua transaksi difasilitasi oleh JFX.
5. SPAKT (Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui)
6. Perbedaan Mekanisme 1 & 2 hanya di setiap mekanisme dalam transaksi kedua poin 2). Untuk mekanisme 1, poin 2) mata uang yang diserahkan. Sedangkan, untuk mekanisme 2, poin 2) mata uang yang diterima.

Survei ini akan menekankan kepada mekanisme ketiga, yaitu mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan ‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah.

Dimana survei ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan para pelaku komoditas syariah, yaitu bank, nasabah komoditas syariah, produsen komoditas syariah, pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengukuran standar pelaporan keuangan syariah sekaligus pandangan pihak akademisi dan praktisi dalam penerapan mekanisme transaksi lindung nilai syariah dengan ‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah.

LEMBAR SURVEI

1. Mengapa LKS di Indonesia perlu melakukan hedging/lindung nilai (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-5 |
| 1 | Praktik yang sudah ada di Negara lain (Malaysia, UK, United Arab, Bahrain, Brunei Darussalam) |  |
| 2 | Untuk mitigasi resiko (*Currency/market risk*) |  |
| 3 | Untuk Liquidity Management |  |
| 4 | Kemungkinan keuntungan yang sudah pasti |  |
| 5 | Inovasi Produk Syariah di Indonesia |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Apa kelebihan mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* dibanding mekanisme pertama dan kedua? (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-3 |
| 1 | Adanya Komoditas |  |
| 2 | Adanya keterlibatan pihak ketiga (Produsen Komoditi) |  |
| 3 | Lebih sesuai dengan syariah |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Menurut pendapat Saudara, apa saja syarat yang diperlukan agar mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* dapat dilakukan? (berikan centang pada kolom yang disediakan, jawaban boleh lebih dari satu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta (JFX) yang merupakan lembaga dibawah Bappebti dan diawasi oleh OJK |  |
| 2 | Tidak mengandung unsur yang dilarang syariah |  |
| 3 | Komoditas asli Indonesia |  |
| 4 | Harga tidak Berfluktuasi dan transparan |  |
| 5 | Terjadi pemindahan kepemilikan secara riil |  |
| 6 | Sistem Online |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Menurut Saudara, komoditas apa saja yang dapat dijadikan komoditas syariah dalam mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah*? (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-7 |
| 1 | Sawit |  |
| 2 | Karet |  |
| 3 | Pulp & Kertas |  |
| 4 | Besi/Baja |  |
| 5 | Kakao |  |
| 6 | Kopi |  |
| 7 | Mete |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Menurut Saudara, apa saja syarat komoditas yang dapat digunakan sebagai *underlying asset* pada mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah*? (berikan centang pada kolom yang disediakan, jawaban boleh lebih dari satu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Tahan Lama |  |
| 2 | Asli Indonesia |  |
| 3 | Harga tidak fluktuatif |  |
| 4 | Kualitas dan kuantitas yang cukup |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Siap (lanjut no 7) |  |
| 2 | Tidak siap (lanjut no. 8) |  |

1. Bagaimana kesiapan LKS dalam hal ini? (berikan centang pada kolom yang disediakan)
2. Apa yang mendasari LKS **siap**? (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-3 |
| 1 | Adanya peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi lindung nilai syariah dengan mekanisme *‘aqd al-tahawwuth bi al-sil’ah* |  |
| 2 | Pencatatan pelaporan keuangan atau pajak sudah jelas dan diawasi oleh OJK |  |
| 3 | Keuangan LKS cukup bagus |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………….

1. Apa saja yang mendasari LKS **tidak siap**? (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-4 |
| 1 | Belum adanya peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi hedging/lindung nilai syariah dengan mekanisme ‘*aqd al-tahawwuth bi al-sil’ah* |  |
| 2 | Pencatatan pelaporan keuangan atau pajak belum jelas |  |
| 3 | Keuangan LKS belum stabil |  |
| 4 | Permintaan yang rendah dari nasabah |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Selain dengan LKS, siapa saja pihak yang dapat berpartisipasi dalam mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* (berikan centang pada kolom yang disediakan, jawaban boleh lebih dari satu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | LK BUMN |  |
| 2 | LK Swasta |  |
| 3 | LK Asing |  |
| 4 | LK Konvensional Indonesia namun menjalin kerjasama dengan LK Syariah Indonesia |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Adakah alasan lain jika ingin melakukan mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* tidak dengan LKS? (berikan centang pada kolom yang disediakan, jawaban boleh lebih dari satu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Dana yang Banyak |  |
| 2 | Permintaan hanya dari lembaga keuangan |  |
| 3 | Loyalitas kepada masyarakat |  |
| 4 | Anjuran pemerintah |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Apa Kendala Lembaga Keuangan Syariah dalam dengan mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* Ini? (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-4 |
| 1 | Belum ada standar akuntansi syariah |  |
| 2 | Mekanisme Lebih Komplek |  |
| 3 | Kontrak Mengikat |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Apa saja syarat untuk menjadi peserta komoditas dalam mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* ini? (berikan centang pada kolom yang disediakan, jawaban boleh lebih dari satu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Mempunyai rekening di bank yang sama dengan bank yang melakukan hedging |  |
| 2 | Mempunyai rekening berbeda namun bank tempat nasabah bertransaksi merupakan bank yang sudah bekerja sama dengan bank yang melakukan aktivitas hedging syariah |  |
| 3 | Lainnya, adanya urgensi dengan transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’a*h lalu memulai kerjasama dengan pihak bank yang bersangkutan |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Bagaimana menyiasati unsur spekulasi yang muncul dalam hedging/lindung nilai syariah ini? (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-5 |
| 1 | Meluruskan niat semua pelaku hedging syariah |  |
| 2 | Menunjukkan dokumen lebih dahulu |  |
| 3 | Dengan adanya bukti tertulis dan sanksi apabila diketahui adanya unsur spekulasi |  |
| 4 | Tidak mengambil margin yang besar |  |
| 5 | Tidak menggunakan komoditas yang harganya fluktuatif |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Apakah Anda setuju apabila SPAKT komoditas syariah ini diperjualbelikan untuk jangka waktu yang lama, melebihi satu tahun untuk menghindari motif spekulasi? (berikan centang pada kolom yang disediakan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Ya |  |
| 2 | Tidak, karena tidak efektif |  |
| 3 | Ragu-ragu, karena tergantung permintaan |  |

1. Apakah dengan mekanisme transaksi hedging/lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *‘aqd al-tahawwuth bi al sil’ah* dapat dijadikan sebagai instrument untuk manajemen likuiditas? (berikan centang pada kolom yang disediakan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | √ |
| 1 | Iya (lanjut no 16) |  |
| 2 | Tidak (lanjut no 17) |  |

1. Apabila jawaban **ya** (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-3 |
| 1 | Karena menggunakan instrumen komoditas |  |
| 2 | Manajemen likuiditas yang timbul akibat transaksi ini sesuai dengan syariah |  |
| 3 | Dapat membantu pertumbuhan LKS |  |

Lainnya, ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

1. Apabila jawaban **tidak** (urutkan berdasarkan prioritas menggunakan angka 1 sebagai yang tertinggi/prioritas utama dan angka terakhir sebagai yang terendah/prioritas terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Peringkat 1-3 |
| 1 | Instrumen komoditas tidak bisa untuk manajemen likuiditas |  |
| 2 | Manajemen likuiditas yang timbul bertentangan dengan prinsip syariah |  |
| 3 | Tidak dapat membantu pertumbuhan LKS |  |

Lainnya, ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………............

……………………….., 2016

Responden

(………………………….)